

Studi Literature: Pendidikan Anak Usia Dini pada Masa Reformasi di Indonesia

Novia Sri Wilanda¹, Rahmadini², Hadiyanto³, Yaswinda⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Padang

* e-mail: ³ hadiyanto@fip.unp.ac.id ⁴ yaswinda@fip.unp.ac.id ¹ novia.sriwilanda29@gmail.com

Abstract

This article presents an analysis of the development of Early Childhood Education (ECE) procedures in reform-era Indonesia. The main focus is on policy implementation and the important role of families and communities in supporting it. The research was conducted using a desk study method to analyze relevant literature. The results show progress in ECE policy development but also identify challenges such as inequitable access and quality of ECE in different regions. Reform-era education reforms emphasize decentralization and competency-based systems, but implementation has been uneven. The role of family and community is considered crucial in supporting the success of ECE by involving them in formal, non-formal and informal education processes. This involvement is important to create an environment that supports the holistic development of young children. The study recommends a systemic approach to education reform, integrating changes to learning experiences, learning systems, local management and legislation systems.

Keywords: *early childhood education, reformation period*

How to cite : Wilanda, N., Rahmadini, R., & Hadiyanto, H. (2024). Studi Literature: Pendidikan Anak Usia Dini pada Masa Reformasi di Indonesia. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(2).
<https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i2.2191>



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes

PERKENALAN

Pentingnya masa awal dalam pertumbuhan anak tidak bisa diabaikan, karena di sinilah fondasi-fondasi penting dibentuk. Pendidikan pada tahap ini adalah kunci untuk menyampaikan konsep-konsep dasar kepada anak sebelum mereka melangkah ke tingkat pendidikan berikutnya. (Yuliatiningsih 2012). Pendidikan Anak Usia Dini menjadi langkah awal pemberian pendidikan anak usia 0-6 tahun sebelum menempuh pendidikan dasar. Di lingkungan PAUD, terdapat para pendidik atau guru yang bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak usia dini. Peran guru dalam konteks ini sangatlah penting karena mereka memiliki tanggung jawab yang tidak muda (Nurpatimah and Saputra 2022). Pentingnya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang mumpuni dan optimal tidak bisa diabaikan begitu saja, karena berkaitan erat dengan masa depan negara dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik.

Pemerintah Indonesia telah mewujudkan dan meningkatkan pembangunan manusia sejak awal kemerdekaan. Beragam cara reformasi pendidikan dilakukan untuk mencapai tujuan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Davis dan Newstrom (1985) berpendapat mutu pendidikan sebagai suatu lembaga ditentukan adanya sarana dan prasarana (*technology*), sumber daya manusia (*people*), sistem organisasi (*structure*), serta lingkungan pendidikan berlangsung (*environment*) (Wahyudi and Lutfi 2019). Proses transformasi menuju negara maju, negara Indonesia melalui banyak perubahan terkhusus bidang pendidikan. Perubahan tersebut menjadi hal

wajar karena perubahan terpengaruhi berbagai faktor yang berbeda-beda dan berkembang tergantung perkembangan dan kebutuhan zaman. Tidak mengherankan jika sistem pendidikan yang dianut pasca kemerdekaan adalah sistem kontinental, karena Indonesia masih menjalin kontak dengan negara Eropa, terkhusus Belanda. Pasca kemerdekaan serta penerapan sistem pendidikan kontinental lebih kurang lima tahun, ditemukan sistem pendidikan Eropa tidak selaras dengan tuntutan perkembangan zaman (Datumula 2021).

Sejak tahun 1990, pendidikan anak usia dini (PAUD) telah ditingkatkan secara *global* sebagai cara untuk mencapai tujuan 'Pendidikan untuk Semua'. Kesadaran akan pentingnya PAUD meningkat pesat di seluruh dunia, yang tercermin dalam peningkatan inisiatif yang signifikan. Di Indonesia, PAUD dikenal sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta sejarahnya mencatat bahwa praktik awal PAUD pada tahun 1920-an dimulai sebagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Berbeda dengan pendidikan di Belanda, inisiatif PAUD lokal di Indonesia menekankan nilai-nilai nasionalisme, agama, dan norma untuk mendukung gerakan nasional (Newberry, 2010; PAUDNI, 2011 dalam (Octarra and Hendriati 2018)).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memberikan landasan dalam perkembangan anak serta memainkan peran krusial dalam membentuk masa depan generasi penerus bangsa. Di Indonesia, perhatian terhadap PAUD semakin meningkat seiring dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi, terutama sejak era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Masa reformasi ditandai dengan upaya demokratisasi, desentralisasi, dan perbaikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam praktik dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Reformasi membawa tantangan dan peluang baru bagi PAUD, dengan berbagai inisiatif dan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, akses, serta relevansi pendidikan anak usia dini.

Reformasi pendidikan memerlukan keterampilan berpikir serta bertindak yang dibandingkan sebelumnya dengan melakukan diagnosis ataupun perubahan paradigma secara menyeluruh menggunakan pendekatan sistematis. Pendekatan ini memperhitungkan hal yang mendasari perubahan akan mempengaruhi aspek lain. Perubahan ini terbagi empat lapisan yang berhubungan. Lapisan pertama yakni perkembangan pengalaman belajar; lapisan kedua ialah prosedur pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang diharapkan; lapisan ketiga meliputi transformasi sistem pengelolaan daerah yang membantu terlaksananya prosedur pembelajaran; serta lapisan keempat yaitu perbaikan sistem perundang-undangan yang mengendalikan dan menjamin keseluruhan prosedur pendidikan tingkatan nasional.

Reformasi pendidikan yang dilakukan bertujuan mengembalikan peran pendidikan sesuai harapan masyarakat, yaitu timbulnya sistem pendidikan yang meningkatkan martabat dan harkat bangsa. Adanya kemauan politik beragam pihak, reformasi diyakini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak hanya memberhentikan reformasi namun juga menuju arah transformasi (Siregar 2021). Di Indonesia, sejak masa kemerdekaan, telah dilakukan berbagai reformasi pendidikan dengan perbaikan tujuan dan kurikulum. Pasca reformasi demokrasi, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% atas keseluruhan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amandemen keempat, Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, yang disahkan tahun 2001.

Penelitian ini memiliki tujuan mengeksplorasi dan menguraikan perkembangan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia pada masa reformasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, dan memahami peran keluarga serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan PAUD. Dengan memahami ketiga aspek ini, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif sehubungan dinamika dan kompleksitas PAUD di era reformasi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan anak usia dini di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mempergunakan metode studi kepustakaan atau *library reseach*, yang dilaksanakan berurutan dimulai dari mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber yang selaras, antara lain jurnal atau artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen

kebijakan terkait pendidikan anak usia dini pada masa reformasi Indonesia. Studi kepustakaan termasuk studi terhadap sumber tekstual seperti buku, artikel, serta jurnal yang diterbitkan bertujuan kemudahan pengambilan data mempergunakan katalog. Penggunaan buku sebagai referensi, serta dapat diketahui juga dengan melihat catatan kaki (Madjid dkk, 2018). Hasil penelitian dijadikan data pendukung kemudian disintesis untuk pemberian informasi dengan lebih bermakna. Peneliti memberikan argumentasi dan menggali informasi, serta data terkait kondisi terkini pendidikan anak usia dini pada masa reformasi di Indonesia yang berhubungan akan keadaan pendidikan anak usia dini masa Reformasi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami berbagai perspektif, temuan, dan diskusi yang telah dilakukan para ahli dan praktisi bidang PAUD. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh sehubungan perkembangan PAUD pada masa reformasi di Indonesia dan menganalisis tantangan yang ada untuk perbaikan lebih lanjut.

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia Pada Masa Reformasi

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis yang diawali permasalahan perekonomian hingga berubah menjadi krisis kepercayaan. Peristiwa ini menjadi pemicu era reformasi di Indonesia ditandai lengsernya pemerintahan presiden Soeharto. Awal periode ini, masyarakat menekankan perbaikan berbagai aspek kehidupan sosial serta politik, termasuk pendidikan. Reformasi pendidikan diperlukan untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni, sejalan dengan kesiapan menghadapi tantangan milenium ketiga yang kompetitif (Khaeruddin and Rahmania 2022).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia pendidikan di Indonesia terjadi perubahan cukup signifikan. Era reformasi tahun 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto yang diambil alih oleh BJ Habibie, menandai dimulainya masa reformasi di bawah pemerintahan Habibie. Era ini menegaskan kedaulatan rakyat yang sempat terkikis pada masa Orde Baru.

Secara teoritis, reformasi ialah transformasi yang terbatas dan mendalam. Skala perubahannya mengikutsertakan keseluruhan masyarakat. Konsep ini semakin jelas dibedakan dengan revolusi. Konsep terakhir memperlihatkan betapa dalamnya pertukaran yang radikal, sementara skala perubahannya mengajak masyarakat secara menyeluruh. Sebagai perubahan yang terbatas akan tetapi mengikut sertakan keseluruhan masyarakat, reformasi melibatkan penataan konstruksi masyarakat, yang diantaranya cita-cita, lembaga, serta saluran yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut (Muhammad, 2006 dalam Siregar 2021).

Era reformasi memberikan ruang bagi pengembangan kebijakan pendidikan baru yang reformatif serta revolusioner. Kurikulum ini berbasis kompetensi. Penyelenggaraan pendidikan mengalami perubahan dari sentralisasi ke arah desentralisasi. Pemerintah menerapkan amanat UUD 1945 di mana mengutamakan biaya pendidikan minimal 20% atas APBN (Datumula 2021).

Era reformasi tidak hanya memerlukan reformasi struktural dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, namun juga pendekatan budaya untuk melengkapi reformasi struktural tersebut. Peranan pendidikan dalam mengembangkan sikap demokratis dimulai lingkup keluarga, sekolah, serta masyarakat di mana semuanya tercakup dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal. Secara umum, kita dapat membangun masyarakat demokratis yang kita impikan (Aisyah 2022).

Pada awal Reformasi 1999, sistem pendidikan Indonesia berubah berkat UU Nomor 22 Tahun 1999 di mana pendidikan beralih pada sektor pembangunan yang kemudian didesentralisasi. Pemerintah sudah memberitahukan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Pada saat yang sama, untuk menyeimbangkan kebutuhan sumber daya manusia bermutu, telah dibentuk sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Pada awal tahun 2003, pemerintah menerbitkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atas perubahan UU Nomor 2 Tahun 1989, di mana pendidikan mulai dimaknai sebagai upaya terencana dan sadar untuk menciptakan suasana serta kegiatan pembelajaran supaya peserta didik aktif melakukan pengembangan potensi

diri sendiri dalam mendapatkan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang nantinya dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Salah satu dampak nyata dari desentralisasi yakni terdampak pada implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk menentukan prioritas mereka serta pembangunan yang perlu diberikan dana. Terdapat hubungan yang kompleks di antara pemerintah pusat dan daerah pasca reformasi. Desentralisasi dapat dikatakan telah mengubah proses politik di Indonesia dan memperjelas keberagaman otonomi daerah (Green, 2005 dalam Octarra and Hendriati 2018). Negara ini mereformasi sistem pendidikan nasionalnya dengan menerbitkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru pada tahun 2003. Reformasi ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan anggaran pendidikan, akses untuk semua, dan sistem pendidikan yang terdesentralisasi. Meskipun desentralisasi memberikan wewenang lebih besar bagi pemerintah daerah membuat kebijakan penting dan keputusan administratif terkait pendidikan di mana pemerintah pusat tetap bertanggung jawab dalam akreditasi, penetapan standar, dan pengembangan kurikulum (Direktorat Kemendikbud, 2004).

Reformasi pendidikan merupakan upaya untuk memperbaiki bidang pendidikan. Reformasi pendidikan mempunyai dua ciri, yakni terprogram serta sistematis. Reformasi pendidikan terencana akan mengarah pada kurikulum ataupun program lembaga pendidikan. Inovasi adalah bagian dari rencana reformasi ini. Inovasi melibatkan pengenalan ide baru, metode baru, ataupun cara baru untuk peningkatan beberapa aspek proses pendidikan sehingga terjadi perubahan yang tidak seperti sebelumnya (Muis and Minhaji 2018).

Era reformasi Indonesia ditandai dengan berbagai pertukaran kebijakan sektor pendidikan AUD. Tonggak penting lainnya adalah implementasi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadikan PAUD bagian integral sistem pendidikan nasional. Selain itu, banyak program dan inisiatif baru, seperti program Taman Bacaan Anak (TBA) ataupun Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah diluncurkan guna peningkatan akses dan kualitas PAUD berbagai daerah.

Kebijakan pemerintahan daerah pada masa reformasi sehubungan PAUD di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kabinet Indonesia Bersatu jilid II (2009-2014), mempunyai tujuan memastikan lapisan masyarakat dari berbagai lapisan keseluruhan wilayah NKRI dapat mengakses PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan 4 hal, yakni pengaturan kelembagaan, standarisasi pengajar, pengembangan kurikulum, serta ketersediaan sarana dan prasarana (Rohmad 2013).

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini pada Masa Reformasi di Indonesia

PAUD diselenggarakan pada era reformasi, seperti Taman Kanak-Kanak (TK) serta Raudhatul Athfal (RA) berstatus kurang jelas, tidak konsisten, serta membingungkan, akan tetapi diakui pula sebagai bagian pendidikan formal namun tidak termasuk dalam jenjang pendidikan formal (Rohmad 2013).

Sejak Reformasi pertengahan 1998, terjadi gelombang perubahan di beberapa aspek kehidupan, diantaranya bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Pertukaran mendasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara kini berdampak pada sistem pemerintahan yang selama ini menggunakan model sentralisasi menuju model desentralisasi (Amiruddin et.al, 2012 dalam Siregar 2021).

Implikasi desentralisasi yakni sektor pendidikan yang tadinya diabaikan, kini menjadi produk politik dengan proses pengambilan kebijakan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Kedua lembaga menilai perlunya mengangkat isu pendidikan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam pengembangan kebijakan PAUD, penelitian ini memperhatikan beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu bentuknya yakni ketimpangan akses dan kualitas PAUD di berbagai daerah, terutama wilayah perdesaan dan

perbatasan. Kurangnya fasilitas, staf pengajar berkualitas, dan pendanaan yang memadai masih menjadi kendala utama yang perlu ditangani.

Reformasi pendidikan memerlukan keterampilan berpikir dan bertindak berbeda dari yang telah ada, melakukan diagnosis atau mengubah paradigma global dengan pendekatan yang sistematis. Perubahan yang terjadi haruslah memperhitungkan bahwa perubahan mendasar pada satu aspek mempengaruhi perubahan mendasar aspek lainnya. Perubahan ini terbagi atas empat lapisan sistem yang berhubungan, yakni tingkatan pertama adalah pertukaran pengalaman belajar, tingkatan kedua pencapaian pengalaman belajar sesuai yang diharapkan, tingkatan ketiga sehubungan perubahan sistem peraturan di bidang yang mendukung terwujudnya sistem pembelajaran, serta tingkatan keempat berhubungan perubahan sistem perundang-undangan yang menjamin dan mengatur keseluruhan sistem pendidikan tingkat nasional. Reformasi bertujuan memberdayakan masyarakat di mana diperlukan fokus pada perubahan tingkatan pertama, khususnya belajar dari pengalaman, hingga pada tingkatan keempat. Pendekatan tingkatan pertama disebut pendekatan *bottom-up*. Hal yang terjadi selain ini ialah pendekatan *top-down*, di mana pemerintah pusat menetapkan ketentuan perundang-undangan serta seperangkat aturan pelaksanaan yang perlu dipatuhi bawahannya, baik di kelas maupun lingkungan sekolah di mana siswa atau warga sekolah memperoleh dan mengembangkan pengalaman belajar (Miarso 2005).

Pendidikan era reformasi belum berhasil sepenuhnya, dikarenakan pemerintah belum memberi kebebasan merancang pendidikan menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan daerah, seperti penentuan kelulusan siswa yang diatur serta diputuskan pemerintah. Adanya peraturan yang menyatakan bahwa siswa adalah subjek setingkat guru, akan tetapi dalam penerapannya guru masihlah sebagai pihak dominan yang menguasai siswanya. Hal ini dapat dikatakan penyelenggaraan pendidikan Indonesia masihlah jauh dalam memperjuangkan hak siswa.

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam mendukung keberhasilan PAUD

Peran pendidikan diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan orang lain ataupun sekelompok orang untuk mencapai taraf hidup spiritual yang lebih tinggi. Siswa adalah seorang individu yang belum dewasa dengan ditempatkan di bawah asuhan pendidik. Fokus kegiatan pendidikan adalah untuk mendukung siswa agar dapat berkembang. Berdasarkan sudut pandang siswa, ampaknya mereka terus hidup dalam lingkungan masyarakat tempat mereka menjalani pendidikan. Pendidikan dijalankan pada tiga lingkungan, diantaranya keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta adapula berupa formal, informal, dan non formal.

Pemangku kepentingan yang berpartisipasi menyediakan pendidikan bermutu bagi AUD yaitu orang tua, pengajar, administrator sekolah, serta masyarakat. Proses ini dikembangkan di antara pemangku kepentingan yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak (Hardiyanti 2021). Secara umum keberhasilan pendidikan terpengaruh peran serta seluruh masyarakat. Secara lebih khusus lagi, diharapkan orang tua berperan menyelenggarakan pendidikan serta mendukung secara langsung maupun tidak langsung atas terselenggaranya pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan orang tua juga sangat penting. Layanan pendidikan AUD termasuk bagian tujuan pendidikan nasional, di mana pendidikan anak usia dini termasuk upaya pelatihan anak dari lahir hingga berusia enam tahun, termasuk memberi rangsangan pendidikan guna mendorong pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan mental anak supaya siap untuk belajar. Pemberian stimulasi pendidikan anak bermanfaat untuk persiapan akademik (Amalia 2024).

Lingkup masyarakat sederhana, keluarga memiliki dua fungsi, yakni fungsi konsumsi dan fungsi produksi. Masa depan anak dalam kehidupan bermasyarakat tidak berbeda jauh dengan kehidupan orang tuanya. Orang tua mengajarkan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Orang tua turut memberikan pelatihan serta nasihat berbagai sendi kehidupan hingga anak menjadi dewasa (Muis and Minhaji 2018). Keluarga dan masyarakat dalam pendidikan AUD menjadi fokus penting penelitian ini. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kolaborasi erat antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan AUD. Oleh karena itu, kita harus melipatgandakan upaya untuk mengikutsertakan orang tua dan masyarakat membantu keberlanjutan pendidikan anak usia dini.

Peran keluarga

Lingkungan keluarga ialah lingkungan pendidikan pertama dikarenakan keluargalah tempat pertama kali anak dididik serta dibimbing, serta sebagian besar kehidupannya berlangsung dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, pendidikan yang diterima sebagian besar anak terjadi dalam keluarga (Muis and Minhaji 2018). Setiap orang tua dalam keluarga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka dihormati. Orang tua yang saling memberi dukungan satu sama lain, menjadikan keterampilan mengasuh anak meningkat dan lebih membangun ikatan dengan anak-anak mereka. Hal ini bisa digunakan sebagai ukuran kepuasan, mulai dari pengaturan pembagian peran, orang tua, dan pasangan mengadakan kontrak pernikahan (Mulia and Kurniati 2023). Oleh sebab itu, lingkungan keluarga berperan penting dalam pendidikan anak, baik sebagai tempat pertama anak menerima maupun sebagai penunjang dan pengatur peran antar orang tua.

Pentingnya keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan program PAUD yaitu demi kemajuan dan keberhasilan program PAUD. Orang tua merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan program PAUD. Pengetahuan orang tua akan pendidikan pada masa emas merupakan salah satu bentuk keterlibatan orang tua. Tingkat kepercayaan orang tua terhadap lembaga PAUD merupakan pintu gerbang keberhasilan program. Keterlibatan orang tua anak usia dini merupakan bentuk keterlibatan orang tua dalam program PAUD (Jamilah 2019).

Pentingnya partisipasi orang tua khususnya dalam pendidikan AUD tidak hanya karena usianya merupakan masa pembentukan pemahamannya terhadap dunia, tetapi karena pendidikan AUD didominasi oleh pembelajaran akademis dengan mempunyai nilai yang jelas baik dan buruknya. Pendidikan anak usia dini cenderung ke arah pendidikan non-akademik, yang mana pemahamannya terhadap struktur sosial yang berlaku di masyarakat lebih ditekankan dibandingkan prestasi akademiknya. Cara anak belajar berbagi dengan teman, mengatur waktu, belajar disiplin, dan melatih keterampilan bahasa dan matematika sejak dini tidak hanya soal benar atau salah, di mana hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan ketika melibatkan orang tua.

Masa kanak-kanak di mana komunikasi orang tua dan guru harus terjalin agar tidak timbul kendala yang sering muncul seperti kurangnya apresiasi terhadap upaya orang tua oleh guru. Orang tua perlu menahan diri, apalagi jika menyangkut penyelesaian tugas sekolah anaknya. Konsep yang ditanamkan anak usia dini hanya memerlukan menyiapkan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Nilai bukan menjadi fokus utama karena seringkali pekerjaan rumah berada pada jenjang level PAUD dengan tujuan memberikan anak kesempatan mengembangkan diri sesuai potensinya ataupun melatih anak dalam keterampilan yang diperlukan untuk pendidikan lanjutan. Jika unsur tersebut benar-benar dapat dipertahankan dan diterapkan dalam sistem pendidikan anak usia dini, maka akan semakin muncul perasaan positif bahwa anak generasi penerus bangsa akan berkembang optimal.

Peran masyarakat

Program PAUD menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai agen perubahan peradaban. Komitmen pemerintah tersebut diwujudkan melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak pendidikan dasar bagi warga negara. UU Sistem Pendidikan Nasional secara jelas menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini (pasal 28), yang menunjukkan bahwa PAUD merupakan elemen penting dalam mempersiapkan sumber daya alam manusia untuk masa depan. Mewujudkan pencapaian dan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau pemerintah daerah berkontribusi dalam pelayanan PAUD, khususnya dalam hal pembiayaan. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1 yang mengatur bahwa dana pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN (Aprilyani and Qosim Khoiri Anwar 2021).

Masyarakat dapat dimaknai sekelompok individu yang tinggal di wilayah tertentu, dihubungkan oleh kesamaan pengalaman, mempunyai kesamaan dan sadar akan solidaritas, persatuan, dan bekerja sama mengatasi tantangan hidup. Masyarakat juga dapat dianggap sebagai

suatu struktur sosial yang mempunyai nilai dan budaya tersendiri. Masyarakat juga dapat berfungsi sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan ruang kehidupan sosial kompleks mencakup berbagai aspek, seperti etnis, agama, ekonomi, dan sebagainya. Masyarakat berinteraksi dan bertindak dalam masyarakat multidimensi (Muis and Minhaji 2018).

Partisipasi aktif masyarakat diperlukan dalam upaya inovasi paradigma pendidikan. Masyarakat mempunyai peran strategi dan sentral dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penerapan paradigma pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu alternatif solusi terhadap model pengelolaan pendidikan berbasis pemerintah.

Masyarakat mempunyai peran penting dalam keberhasilan PAUD melalui berbagai cara, diantaranya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan PAUD, menjadi sukarelawan, mendukung program PAUD, meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima anak. Masyarakat dapat membantu penyediaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan lembaga PAUD melalui donasi ataupun gotong royong. Kemitraan antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah dapat memperkuat sistem PAUD dengan memastikan kebijakan dan program relevan dengan kebutuhan lokal. Masyarakat turut berperan dalam memantau dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan PAUD, sehingga program berjalan transparan dan akuntabel. Kerja sama yang erat antara semua pihak, PAUD dapat menjadi lembaga yang mampu membekali anak dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Penelitian dengan metode studi literatur ini menunjukkan bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia masa reformasi mengalami perubahan signifikan, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan, maupun metode pendidikan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, yaitu pengembangan kebijakan PAUD pada masa reformasi membawa perubahan besar dalam kebijakan pendidikan Indonesia, dengan fokus pada desentralisasi dan peningkatan akses terhadap pendidikan. Kebijakan PAUD diperkuat dengan peningkatan alokasi minimal mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan reformasi memungkinkan pengembangan PAUD lebih komprehensif, dengan berfokus pada kebutuhan anak. Tantangan dalam implementasi kebijakan, yakni meskipun terdapat kemajuan dalam kebijakan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan PAUD. Tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya infrastruktur, kualitas pengajar, dan kesenjangan akses terhadap pendidikan di daerah terpencil. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Peran keluarga dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan PAUD yang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Keluarga berperan memberikan dukungan awal terhadap pembelajaran anak, sementara masyarakat berkontribusi melalui program dan inisiatif lokal. Perlu adanya koordinasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi anak.

Penelitian ini secara menyeluruh menunjukkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam pengembangan PAUD selama masa reformasi, masih terdapat tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pendidikan dengan lebih baik. Adanya pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan PAUD di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan landasan yang kokoh bagi generasi mendatang.

REFERENSI

- Aisyah, Siti. 2022. "Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)." *Journal of Islamic Education El Madani* 2(1):47–56. doi: 10.55438/jiee.v2i1.39.
- Amalia, Ratih. 2024. "Partisipasi OrangTua Dalam Pelaksanaan Program PAUD." *Jurnal Komprehensif* 2(1):1–10.

- Aprilyani, Trias, and Qosim Khoiri Anwar. 2021. "Manajemen Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan PAUD." *Journal of Nusantara Education* 1(1):9–18. doi: 10.57176/jn.v1i1.5.
- Datumula, Sarfika. 2021. "Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1(2):56–78. doi: 10.24239/moderasi.vol1.iss2.27.
- Hardiyanti, Dwi. 2021. "Keluarga: Pendekatan Teoritis Terhadap Keterlibatan Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Sentra Cendekia* 2(1):21. doi: 10.31331/sencenivet.v2i1.1618.
- Jamilah. 2019. "Kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini (Sinergi Tiga Pilar Pendidikan :." *Simulcara* 2(2):181–94.
- Khaeruddin, and Rahmania. 2022. "Era Reformasi; Titik Balik Pendidikan Indonesia." *Nubin Smart Journal* 2(2):16–25.
- Muis, Abd, and Minhaji Minhaji. 2018. "Otonomi Dan Reformasi Pendidikan." *Edupedia* 3(1):23–32. doi: 10.35316/edupedia.v3i1.317.
- Mulia, Pupun Suci, and Euis Kurniati. 2023. "Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah Pedesaan Indonesia." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7(3):3663–74. doi: 10.31004/obsesi.v7i3.4628.
- Nurpatimah, Aam, and Adi Saputra. 2022. "Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)." *Jurnal PAUD Emas Volume* 1(2):8–12.
- Octarra, Harla Sara, and Agustina Hendriati. 2018. "'Old, Borrowed, and Renewed': A Review of Early Childhood Education Policy in Post-Reform Indonesia." *Policy Futures in Education* 16(1):80–91. doi: 10.1177/1478210317736207.
- Rohmad, Ali. 2013. "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam Pada Pemerintahan Era Reformasi." *Jurna Edukasi* 1:298–327.
- Siregar, Epi Supriyani. 2021. "Dampak Reformasi Pendidikan Indonesia Di Abad 21." *Jurnal Guru Kita PGSD* 5(4):123. doi: 10.24114/jgk.v5i4.28403.
- Wahyudi, Mgs Ahmad, and Achmad Lutfi. 2019. "Analisis Reformasi Pendidikan Dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 9(2):191–201.
- Yuliatiningsih, Margaretha Sri Taty Setiaty. 2012. "Kompetensi Pedagogik Guru PAUD Dalam Mengembangkan Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini." *Cakrawala Dini - Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3(1):1–18.